

Dari Bonus Demografi ke Bonus Demokrasi: Aktivisme dan Peran Kritis Kaum Muda sebagai Motor Transformasi Demokrasi Indonesia

Onessimus Febryan Ambun¹

¹ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: Onessimvsfebryan@gmail.com

Abstrak:

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang bersejarah, yang ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah penduduk muda produktif. Meskipun keuntungan demografis ini memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin kemajuan demokrasi. Demokrasi Indonesia saat ini menghadapi krisis vitalitas—yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan sipil, dominasi kekuasaan oligarkis, apatisisme politik, serta menyempitnya ruang sipil untuk partisipasi. Penelitian ini berargumen bahwa bonus demografi hanya dapat diubah menjadi bonus demokrasi apabila potensi kritis, reflektif, dan kreatif warga muda diberdayakan untuk menghidupkan kembali kehidupan demokratis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, tulisan ini mengkaji bagaimana aktivisme kaum muda—yang termanifestasi melalui gerakan seperti #ReformasiDikorupsi, #TolakOmnibusLaw, dan #IndonesiaGelap—berfungsi sebagai bentuk kewargaan kritis yang mendefinisikan ulang demokrasi melampaui partisipasi elektoral. Dengan merujuk pada teori demokrasi partisipatif dan gerakan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia sedang muncul sebagai agen transformatif yang menjembatani idealisme dan praksis. Aktivisme mereka tidak hanya menantang ketidakadilan struktural, tetapi juga merekonstruksi demokrasi sebagai praktik hidup yang berakar pada solidaritas, perlawanan, dan pembaruan kewargaan. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana energi moral dan politik generasi muda ini dapat dikembangkan dan dilembagakan secara efektif.

Kata kunci: Bonus Demografi, Bonus Demokrasi, Transformasi Demokrasi, Aktivisme Kaum Muda, Kewargaan Kritis.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini sedang berada di tengah momentum historis yang sangat menentukan. Dalam beberapa tahun terakhir, bangsa ini mengalami bonus demografi, yakni kondisi di mana proporsi penduduk muda yang produktif meningkat secara signifikan. Kondisi

demografis yang unik ini menjadikan mereka kelompok sosial terbesar dalam sejarah Indonesia sejak era kemerdekaan. Menurut data BPS, puncak bonus demografi terjadi pada periode 2020-2030, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total populasi.¹ Proporsi usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif ini menciptakan potensi luar biasa bagi akselerasi pembangunan nasional. Fenomena ini sering disebut sebagai *once-in-a-lifetime opportunity*, karena potensi demografis sebesar ini tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat.

Secara umum, wacana publik selama ini menyoroti bonus demografi sebagai peluang emas bagi pembangunan di setiap bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk di dalamnya, dinamika demokrasi.² Ironisnya, di tengah melimpahnya potensi sumber daya manusia muda dalam bonus demografi ini, vitalitas demokrasi Indonesia justru menghadapi tantangan serius. Dalam laporan *Democracy Index* yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2024, vitalitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, dengan skor yang menempatkan Indonesia dalam kategori "*flawed democracy*" (demokrasi cacat). Laporan tersebut menyoroti kemunduran demokrasi yang ditandai dengan melemahnya partisipasi dan kepercayaan publik serta meningkatnya praktik politik transaksional dan oligarkis. Situasi ini kemudian diperburuk oleh erosi kebebasan sipil, pembatasan ruang ekspresi, dan konsolidasi kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sejati.³

Namun, di tengah situasi demokrasi yang stagnan, kaum muda saat ini justru menunjukkan daya kritis dan energi politik yang luar biasa melalui berbagai bentuk aktivisme sosial dan politik. Merujuk pada analisis dari pakar politik, Bivitri Susanti, gerakan-gerakan besar para pemuda dewasa ini seperti *#ReformasiDikorupsi* (2019), *#TolakOmnibusLaw* (2020), hingga *#IndonesiaGelap* (2025) memperlihatkan bahwa kaum muda bukan sekadar objek demografi, melainkan subjek politik yang mampu menggerakkan diskursus publik, menggugat ketidakadilan, dan menuntut akuntabilitas negara.⁴ Fenomena ini membuka peluang strategis bagi transformasi dari bonus demografi menjadi bonus demokrasi, di mana energi kolektif kaum muda diarahkan untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

Meski demikian, kajian akademis tentang hubungan antara bonus demografi dan demokrasi masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti dalam kajian Wasisto

¹ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan* (Jakarta, Badan Pusat Statistik: 2022), hlm. 55-65.

² Muchamad Zaid Wahyudi, "Demonstrasi dan Anarki Massa, Buah Bonus Demografi yang Dilupakan", dalam *Kompas* (3/9/25), <https://www.kompas.id/artikel/demonstrasi-dan-anarki-massa-buah-bonus-demografi-yang-dilupakan>, diakses pada 19 Oktober 2025.

³ Vedro Imanuel Girsang, "EIU Research: Indonesia's Democracy Rated as 'Flawed' After 2024 Elections", dalam *Tempo English*, <https://en.tempo.co/read/1982814/eiu-research-indonesias-democracy-rated-as-flawed-after-2024-elections>, diakses pada 21 Oktober 2025.

⁴ Bivitri Susanti, "Aktivisme dan Ketidakadilan", dalam *Kompas* (16/10/2025), <https://www.kompas.id/artikel/aktivisme-dan-ketidakadilan>, diakses pada 21 Oktober 2025.

Raharjo Jati (2015)⁵ dan Nurul Qomariyah dkk. (2023)⁶, lebih banyak menyoroti aspek ekonomi dan pembangunan dari bonus demografi, sementara dimensi politik dan kultural kaum muda sebagai agen demokratisasi jarang disentuh secara mendalam. Namun, dalam konteks ini, beberapa studi penting telah membuka jalan bagi pembacaan baru terhadap generasi muda Indonesia. Rahmat Affandi dan Katimin (2025)⁷, misalnya, menelusuri idealisme politik generasi milenial yang bergerak di antara optimisme dan pesimisme terhadap masa depan demokrasi. Sementara itu, penelitian Dea Zailani Lestari dkk. (2024)⁸ serta Denint Dewangga dkk. (2024),⁹ menyoroti bentuk-bentuk partisipasi pemuda dalam menjaga ruang kebebasan dan mengawal proses demokrasi, terutama di era digital. Meskipun demikian, belum banyak studi yang menghubungkan dinamika aktivisme kritis ini dengan konteks bonus demografi sebagai kondisi historis yang memungkinkan munculnya energi politik baru.

Kesenjangan inilah yang menjadi ruang refleksi bagi penelitian ini. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, tulisan ini berupaya memahami bonus demografi bukan hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi sebagai peluang sosial politik untuk mentransformasikan vitalitas demografi menjadi vitalitas demokrasi. Fokusnya diarahkan pada bagaimana kaum muda mengartikulasikan peran kritis mereka melalui aktivisme sosial, politik, dan kultural yang berpotensi menghidupkan kembali semangat demokrasi partisipatoris di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab sejumlah pertanyaan penting: (1) bagaimana hubungan antara fenomena bonus demografi dan dinamika demokrasi di Indonesia kontemporer; (2) bagaimana kaum muda mengartikulasikan peran kritis mereka dalam menghadapi krisis vitalitas demokrasi; (3) dalam bentuk apa aktivisme sosial, politik, dan kultural kaum muda berkontribusi terhadap transformasi menuju “bonus demokrasi”; serta (4) apa saja tantangan struktural dan kultural yang menghambat proses transformasi tersebut. Dengan merespons pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa energi demografis kaum muda dapat menjadi motor transformasi menuju bonus demokrasi—sebuah masa ketika keberlimpahan penduduk muda tidak hanya dihitung dalam angka, tetapi dirasakan dalam kualitas kehidupan demokratis bangsa.

⁵ Wasisto Raharjo Jati, “Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia?”, dalam *Populasi*, Vol. 23, No. 1, 2015, hlm. 1-19.

⁶ Nurul Qomariyah, dkk., “Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi di Tahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia”, dalam *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No. 1, Mei 2023, hlm. 180-186.

⁷ Rahmat Affandi dan Katimin, “Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia)”, dalam *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 316-322

⁸ Dea Zailani Lestari, dkk., “Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah Peran Pemuda dalam Menjaga Kelangsungan Demokrasi”, dalam *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 122-128.

⁹ Denint Akbar Reggi Dewangga, dkk., “Peran Pemuda dalam Mengawal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital (Studi Kasus: Masa Pemilihan Presiden 2024)”, dalam *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 7, 2024, hlm. 1-13.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Menurut John Creswell, penelitian kualitatif berorientasi pada teks, narasi, dan interpretasi mendalam terhadap makna, yang sejalan dengan tujuan studi literatur ini.¹⁰ Oleh sebab itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran terhadap berbagai sumber pustaka primer dan sekunder yang relevan, mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga survei nasional dan internasional, dokumen kebijakan publik, serta artikel berita terkait gerakan aktivisme kaum muda di Indonesia dalam kurun waktu 2019-2025. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutis-kritis dengan menafsirkan fenomena bonus demografi dan aktivisme kaum muda dalam kerangka teori demokrasi partisipatoris, teori gerakan sosial, serta konsep agen transformasi sosial-politik. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti “*to explore and understand the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*”, sebagaimana ditekankan oleh Creswell, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat netral, tetapi reflektif terhadap konteks sosial yang melingkupinya.¹¹ Oleh karena itu, proses analisis melibatkan identifikasi pola-pola aktivisme, interpretasi makna di balik gerakan-gerakan tersebut, serta evaluasi kritis terhadap implikasi sosial-politik bagi transformasi demokrasi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara empiris, tetapi juga mengeksplorasi dimensi reflektif dan normatif dari peran kaum muda sebagai agen perubahan demokratis dalam konteks bonus demografi yang sedang dialami Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Bonus Demografi Indonesia: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana?

Indonesia saat ini sedang berdiri di ambang sebuah momentum besar dalam sejarahnya. Untuk pertama kalinya, proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai puncaknya antara 2020 hingga 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), kelompok usia produktif mencakup sekitar 70% dari total populasi, atau lebih dari 191 juta jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari 84 juta jiwa adalah penduduk muda berusia 15–34 tahun—proporsi terbesar dalam sejarah republik ini.¹² Di atas kertas, angka ini adalah kabar baik. Ia menjanjikan ledakan produktivitas, inovasi, dan energi sosial yang bisa mendorong Indonesia melompat lebih jauh. Namun, di balik janji itu, tersimpan pula pertanyaan mendasar: apakah bonus demografi ini akan menjadi jendela peluang atau justru jendela bencana?

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: SAGE Publications, 2014), hlm. 232.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

¹² Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *loc. cit.*

Secara kasat mata, tanda-tanda kemajuan terlihat jelas. Dalam dua dekade terakhir, generasi muda Indonesia menunjukkan kemajuan yang menjanjikan secara kuantitatif. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi, misalnya, meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 19% pada 2010 menjadi 36% pada 2023.¹³ Peningkatan akses pendidikan ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas sumber daya manusia muda Indonesia telah mengalami perbaikan mendasar. Selain itu, kemampuan akses terhadap teknologi dan informasi juga sangat tinggi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025) mencatat bahwa 90% kaum muda berusia 15–34 tahun aktif menggunakan internet.¹⁴ Mereka adalah generasi *digital native* yang hidup dalam arus keterhubungan global, terbiasa dengan komunikasi cepat, serta memiliki kesadaran terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan. Menurut Yudi Latif, generasi muda Indonesia kini tumbuh dalam ekosistem digital yang memungkinkan terbentuknya *civic literacy* baru—yakni kemampuan memahami, mengakses, dan memengaruhi ruang publik melalui media digital.¹⁵ Jika diarahkan dengan baik, inilah modal sosial yang dapat memperkuat partisipasi warga dan membentuk masyarakat yang lebih terbuka serta dinamis.

Namun di balik potensi yang menggetarkan itu, ada paradoks yang tak bisa diabaikan. Akses pendidikan memang meningkat, tetapi mutu pembelajaran masih timpang. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA, 2022) menempatkan Indonesia di peringkat 63 dari 81 negara untuk literasi membaca, matematika, dan sains.¹⁶ Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di kalangan muda mencapai 22,25% pada 2023 (BPS, 2023), jauh di atas rata-rata nasional.¹⁷ Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk terdidik belum otomatis menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif. Jika dibiarkan tanpa kebijakan yang progresif, bonus demografi dapat berubah menjadi *bencana demografi*—di mana kelebihan populasi produktif justru menjadi beban bagi ekonomi dan stabilitas sosial.

Selain tantangan ekonomi dan pendidikan, dimensi sosial-politik dari bonus demografi juga memperlihatkan wajah yang tak kalah kompleks. Menurut Bivitri Susanti dalam artikelnya di majalah *Kompas*, keterbukaan informasi yang dinikmati generasi muda tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman refleksi kritis. Di tengah derasnya arus informasi dan opini publik, mereka sering dihadapkan pada disinformasi, polarisasi politik, serta lemahnya ruang dialog yang sehat. Di sisi lain, institusi politik formal masih gagal menyediakan wadah yang

¹³ Yanuar Jatnika, “Upaya Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi”, dalam *Puslapdik Kemendikdasmen*, <https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/upaya-meningkatkan-apk-pendidikan-tinggi/>, diakses pada 21 Oktober 2025.

¹⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet* (Pusat APJII: Jakarta, 2025), hlm. 23.

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm. 415.

¹⁶ Annisa Febiola, “Studi PISA 2022: Indonesia Naik Peringkat tapi Skor Turun”, dalam *Tempo.com* (5/12/23), <https://www.tempo.co/politik/studi-pisa-2022-indonesia-naik-peringkat-tapi-skor-turun-112219>, diakses pada 22 Oktober 2025.

¹⁷ Riska Dian Safitri dan Muh Rezza, “Membedah Tren Tingginya Angka Pengangguran Terbuka Pada Gen Z Di Indonesia”, dalam *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2025, hlm. 637.

inklusif bagi aspirasi generasi muda.¹⁸ Akibatnya, muncul jurang antara kesadaran politik yang tinggi dengan saluran partisipasi yang sempit. Seperti diingatkan Hannah Arendt, politik kehilangan maknanya ketika warga tidak memiliki ruang untuk bertindak bersama secara reflektif.¹⁹ Paradoks ini menciptakan situasi di mana generasi yang paling terdidik dan terhubung justru merasa paling jauh dari proses politik yang dijalankan atas nama mereka. Kekosongan partisipasi bermakna inilah yang berisiko besar dapat mengubah peluang demografis menjadi bencana sosial dan politik.

Jika dianalisis lebih jauh, ancaman terbesar dari bonus demografi bukanlah kegagalan ekonomi semata, tetapi kegagalan politik untuk menyediakan wadah partisipasi yang bermakna bagi populasi mudanya. Sejarah menunjukkan bahwa momentum demografis tidak selalu berujung pada keberhasilan. Mesir dan Nigeria, misalnya, gagal memanfaatkan populasi mudanya karena lemahnya tata kelola, korupsi, dan stagnasi politik.²⁰ Alih-alih menjadi motor pembangunan, generasi muda di kedua negara tersebut justru terperangkap dalam frustrasi sosial dan pengangguran massal. Pelajaran itu penting bagi Indonesia: bonus demografi tidak hanya tentang jumlah penduduk muda, tetapi tentang kualitas demokrasi yang menopangnya. Kuantitas baru bermakna jika disertai partisipasi politik yang reflektif, etis, dan berorientasi pada perubahan struktural. Oleh karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar mengelola tenaga produktif, tetapi menumbuhkan warga muda yang kritis, berdaya, dan sadar tanggung jawab sosial.

Dengan arah ini, pembahasan selanjutnya akan menelusuri bagaimana krisis vitalitas demokrasi Indonesia justru membuka ruang bagi generasi muda untuk tampil sebagai agen pembaruan sosial dan politik yang membuktikan bahwa bonus demografi tidak hanya tentang angka, tetapi tentang keberanian untuk membentuk masa depan demokrasi.

Generasi Muda dan Krisis Vitalitas Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia, yang sejak Reformasi 1998 dipandang sebagai salah satu kisah sukses demokratisasi di Asia Tenggara, kini menghadapi tantangan serius terkait vitalitasnya. Menurut *Democracy Index* yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (2023), Indonesia memperoleh skor 6,44 dari skala 10 dan tetap berada dalam kategori "*flawed democracy*" untuk tahun ketujuh berturut-turut.²¹ Penurunan skor ini mencerminkan stagnasi bahkan kemunduran

¹⁸ Bivitri Susanti, *loc. cit.*

¹⁹ Yosef Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia", dalam *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.14, No. 2, 2023, hlm. 248.

²⁰ Robiatul Kamelia, "Bonus Demografi: Pengertian, Dampak Negatif, dan Positifnya", dalam *Tirto.id* (15/5/25), <https://tirto.id/dampak-negatif-bonus-demografi-hbLA>, diakses pada 22 Oktober 2025.

²¹ Vedro Imanuel Girsang, "Indeks Demokrasi Indonesia 2024 Turun Tiga Peringkat", dalam *Tempo* (5/3/25), <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>, diakses pada 22 Oktober 2025.

dalam beberapa indikator kunci demokrasi, termasuk proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik demokratis, serta kebebasan sipil. Laporan serupa dari *Freedom House* (2025) juga menunjukkan penurunan skor kebebasan Indonesia dari 65 menjadi 56 dalam lima tahun terakhir, dengan peringatan khusus terhadap melemahnya independensi institusi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan meningkatnya polarisasi politik.²² Data-data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator empiris bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami krisis vitalitas yang struktural dan sistemik, di mana prosedur demokratis masih berjalan tetapi substansi demokrasi—seperti akuntabilitas, representasi, dan partisipasi bermakna—semakin terkikis.

Salah satu manifestasi paling nyata dari krisis ini adalah menguatnya fenomena oligarki politik yang menguasai hampir seluruh arena demokrasi formal. Menurut Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dalam buku yang berjudul *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, kekuasaan politik di Indonesia tidak lagi ditentukan oleh kehendak rakyat secara substantif, melainkan oleh segelintir elite ekonomi-politik yang memiliki akses terhadap sumber daya material dan simbolik. Partai politik, parlemen, hingga proses pemilihan umum telah terjebak dalam logika transaksional yang mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang aspirasi publik.²³ Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi mengalami erosi yang signifikan. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat bahwa hanya 64,8% masyarakat yang mempercayai DPR, dan 64,2% mempercayai partai politik—angka terendah sejak era Reformasi.²⁴ Sementara itu, ruang partisipasi warga yang seharusnya menjadi jantung demokrasi justru semakin menyempit, baik karena regulasi represif seperti UU ITE yang sering digunakan untuk membungkam kritik, maupun karena kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis yang vokal menyuarakan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan paradoks demokrasi prosedural: pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi warga kehilangan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna di luar siklus elektoral.

Di tengah krisis demokrasi ini, muncul ketimpangan yang ironis antara potensi demografis yang besar dan realitas demokrasi yang stagnan. Indonesia memiliki modal demografis luar biasa berupa 64 juta penduduk usia muda yang seharusnya menjadi energi penggerak revitalisasi demokrasi. Namun, potensi ini tidak secara otomatis bertransformasi menjadi partisipasi politik yang produktif. Kaum muda justru menghadapi dilema eksistensial: di satu sisi, mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi dan akses terhadap informasi yang luas melalui teknologi digital; di

²² Freedom House, “Indonesia”, dalam *Freedom in The World 2025*, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>, diakses pada 23 Oktober 2025.

²³ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 203-210.

²⁴ Lembaga Survei Indikator, *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik: Temuan Survei Nasional* (LSI: Jakarta, 2024), hlm. 57.

sisi lain, mereka menemukan bahwa sistem demokrasi formal tidak menyediakan ruang yang memadai untuk partisipasi substantif mereka.²⁵ Posisi kaum muda dalam lanskap politik Indonesia kini berada di persimpangan antara harapan dan kekecewaan, antara idealisme dan apatisisme. Survei Indikator Politik Indonesia (2023), sebagaimana disajikan Rahmat Affandi dan Katimin (2025) menunjukkan bahwa 41% kaum muda menyatakan tidak tertarik dengan politik formal karena menganggapnya korup dan tidak relevan dengan kehidupan mereka, namun 68% dari mereka menyatakan peduli terhadap isu-isu sosial seperti keadilan, lingkungan, dan kesetaraan.²⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa kaum muda tidak apatis terhadap kehidupan publik, melainkan mengalami krisis representasi dalam sistem demokrasi yang ada.

Krisis representasi ini diperparah oleh tantangan struktural yang menghambat partisipasi bermakna generasi muda dalam demokrasi formal. Berdasarkan penelusuran berbagai kajian, setidaknya terdapat empat faktor utama yang menyebabkan kondisi ini. *Pertama*, sistem kepartaian Indonesia yang oligarkis dan bersifat kartel politik membuat kaum muda sulit menembus struktur kekuasaan tanpa modal ekonomi atau afiliasi keluarga.²⁷ *Kedua*, mekanisme rekrutmen politik yang tertutup dan transaksional menghalangi munculnya kepemimpinan muda yang kredibel dan berintegritas.²⁸ *Ketiga*, wacana politik dominan yang dikuasai elite senior cenderung mengabaikan atau meremehkan aspirasi dan perspektif kaum muda, sehingga mereka merasa tidak didengar dan tidak diwakili.²⁹ *Keempat*, regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi menciptakan efek jera (*chilling effect*) bagi aktivisme politik kaum muda.³⁰ Kondisi-kondisi struktural ini menciptakan alienasi politik di kalangan generasi muda, yang mendorong mereka mencari jalur partisipasi alternatif di luar sistem formal. Namun, alih-alih menjadi tanda apatisisme, fenomena ini justru menunjukkan bahwa kaum muda sedang mencari dan menciptakan bentuk-bentuk baru demokrasi yang lebih autentik, partisipatoris, dan responsif terhadap aspirasi mereka.

Aktivisme dan Peran Kritis Kaum Muda dalam Transformasi Demokrasi

Ketidakpuasan terhadap stagnasi demokrasi formal tidak membuat generasi muda Indonesia tenggelam dalam apatisisme politik, melainkan justru melahirkan gelombang aktivisme yang beragam, dinamis, dan inovatif. Dalam kurun waktu 2019-2025, Indonesia menyaksikan munculnya berbagai gerakan sosial dan politik yang dipimpin oleh kaum muda sebagai respons

²⁵ Denint Akbar Reggi Dewangga, dkk, *op. cit.*, hlm. 5-6.

²⁶ Rahmat Affandi dan Katimin, *op. cit.*, hlm. 319.

²⁷ Nurhadi Sucahyo, "Partai Anak Muda untuk Reduksi Polarisasi dan Lawan Oligarki", dalam *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/partai-anak-muda-untuk-reduksi-polarisasi-dan-lawan-oligarki/6542673.html>, diakses pada 23 Oktober 2025.

²⁸ Dea Zailani Lestari, dkk, *op. cit.*, hlm. 125.

²⁹ Muchamad Zaid Wahyudi, *loc. cit.*

³⁰ Denint Akbar Reggi Dewangga, dkk, *op. cit.*, hlm. 8.

kritis terhadap krisis demokrasi. Salah satu yang paling menonjol adalah gerakan *#ReformasiDikorupsi* yang meletus pada September 2019. Gerakan ini dimulai sebagai respons terhadap upaya DPR untuk merevisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di puluhan kota di seluruh Indonesia, menuntut pembatalan revisi tersebut. Gerakan ini berhasil memobilisasi massa lintas generasi dan latar belakang sosial, menciptakan momentum politik yang memaksa pemerintah dan DPR untuk menunda beberapa rancangan undang-undang kontroversial. Yang menarik, gerakan ini bukan hanya menolak pelemahan KPK secara prosedural, tetapi juga menyoroti jejaring oligarki politik-ekonomi yang berupaya menggerogoti institusi pengawasan publik demi melindungi kepentingan elite.³¹

Momentum serupa terulang pada Oktober 2020 melalui gerakan *#TolakOmnibusLaw* yang menentang disahkannya UU Cipta Kerja. Mahasiswa, buruh, dan aktivis lingkungan bersatu menolak undang-undang yang dianggap dibuat secara terburu-buru, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi publik. Gerakan ini memperlihatkan bagaimana kaum muda mampu membangun koalisi lintas sektor untuk memperjuangkan isu yang kompleks dan multidimensional—mulai dari perlindungan pekerja, kelestarian lingkungan, hingga proses legislasi yang demokratis. Meskipun undang-undang tetap disahkan, gerakan ini berhasil membangkitkan kesadaran publik yang luas tentang pentingnya partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan.³² Lebih dari itu, gerakan ini menunjukkan bahwa penolakan kaum muda bukan sekadar reaksi emosional, melainkan kritik struktural terhadap praktik legislasi yang elitis dan tertutup, di mana kepentingan korporasi dan elite politik lebih diutamakan daripada aspirasi rakyat.

Gelombang aktivisme kaum muda berlanjut hingga awal 2025 dengan munculnya gerakan *#IndonesiaGelap* yang digelar oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan serentak kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto. Gerakan ini merupakan respons terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan baru, khususnya Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja APBN/APBD yang dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesejahteraan publik. Para mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut, menolak rencana pemberian IUP bagi perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis, dan mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan tanpa riset yang memadai. Aksi tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Tagar *#IndonesiaGelap* mencapai 41.767 mentions dan 9 miliar interaksi di media sosial, menunjukkan resonansi yang luas di

³¹ Sri Lestari Wahyuningroem, dkk., *op. cit.*, hlm. 6-7.

³² *Ibid.*, hlm. 7-8.

kalangan publik.³³ Gerakan ini memperlihatkan evolusi aktivisme kaum muda yang semakin matang dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan membangun narasi alternatif yang menantang legitimasi kebijakan pemerintah.

Jika dianalisis secara mendalam, ketiga gerakan besar tersebut mencerminkan karakteristik aktivisme kaum muda kontemporer yang dijelaskan oleh Manuel Castells (2012) dalam *Networks of Outrage and Hope* sebagai "*networked social movements*"—gerakan yang lahir dari "*the space of autonomy*" dan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun solidaritas horizontal serta menantang hierarki kekuasaan tradisional.³⁴ Menurut Castells, gerakan-gerakan ini merupakan manifestasi dari kapasitas kolektif warga untuk menantang struktur kekuasaan yang tidak legitim melalui jaringan komunikasi yang terdesentralisasi.³⁵ Di Indonesia, integrasi ruang fisik dan digital menciptakan ekosistem aktivisme yang resilient: media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat koordinasi, tetapi juga sebagai ruang produksi narasi alternatif yang menantang narasi dominan dari pemerintah dan media arus utama. Hashtag seperti *#ReformasiDikorupsi*, *#TolakOmnibusLaw*, dan *#IndonesiaGelap* menjadi apa yang disebut Castells sebagai "*symbols of connectivity and collective identity*," yang memungkinkan ribuan bahkan jutaan orang membangun solidaritas tanpa harus saling mengenal secara personal.³⁶

Studi yang dilakukan oleh Sri Lestari Wahyuningroem, dkk. (2024) tentang partisipasi politik kaum muda Indonesia menemukan bahwa 67% mahasiswa yang terlibat dalam gerakan *#TolakOmnibusLaw* termotivasi oleh kesadaran bahwa "institusi demokrasi formal tidak lagi merepresentasikan kepentingan publik." Laporan tersebut juga mengidentifikasi bahwa 82% peserta demonstrasi adalah *first-time protesters* yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam aktivisme politik.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil memobilisasi segmen masyarakat yang sebelumnya pasif secara politik. Dalam perspektif teori gerakan sosial, Charles Tilly (2004) dalam *Social Movements: 1768-2004* menekankan bahwa gerakan sosial modern ditandai oleh tiga elemen kunci: *worthiness* (dignitas moral), *unity* (solidaritas kolektif), dan *numbers* (kuantitas peserta).³⁸ Ketiga gerakan besar yang telah diuraikan memenuhi kriteria Tilly: mereka mengklaim superioritas moral (melawan korupsi dan ketidakadilan), membangun solidaritas lintas sektor (mahasiswa, buruh, aktivis), dan menunjukkan kekuatan numerik yang signifikan.

³³ Krisna Pradipta, "Gerakan Indonesia Gelap", dalam *Tempo* (20/2/25), <https://www.tempo.co/infografik/infografik/gerakan-indonesia-gelap-1209865>, diakses pada 21 Oktober 2025.

³⁴ Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (Cambridge: Polity Press, 2012), hlm. 250.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 249-256.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 257

³⁷ Sri Lestari Wahyuningroem, dkk., *op. cit.*, hlm. 15-16.

³⁸ Charles Tilly, *Social Movements: 1768-2004* (Boulder: Paradigm Publishers, 2004), hlm. 4.

Di luar gerakan jalanan yang spektakuler, berkembang pula berbagai gerakan komunitas yang bekerja secara sistematis untuk mengatasi persoalan sosial dan ekologis. Gerakan-gerakan seperti Indonesia Mengajar, Kelas Inspirasi, dan berbagai kolektif pendidikan alternatif menunjukkan komitmen kaum muda terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas.³⁹ Sementara itu, gerakan lingkungan seperti *Fridays for Future* Indonesia, komunitas *zero waste*, dan berbagai inisiatif urban farming memperlihatkan kesadaran ekologis yang kuat di kalangan generasi muda.⁴⁰ Antonio Gramsci (1971) dalam *Selections from the Prison Notebooks* menekankan pentingnya "*war of position*" (perang posisi) dalam transformasi sosial, yakni perjuangan kultural dan ideologis yang berlangsung dalam waktu panjang untuk mengubah *common sense* masyarakat.⁴¹ Aktivisme kultural kaum muda—melalui karya seni jalanan, musik underground yang mengkritik ketidakadilan, dan produksi konten digital yang mengampanyekan nilai-nilai kesetaraan—merupakan bentuk kontemporer dari "*war of position*" Gramscian. Gramsci menulis, "*every revolution has been preceded by an intense labor of criticism, of cultural penetration*," dan aktivisme kultural kaum muda Indonesia sedang melakukan "*labor of criticism*" tersebut untuk membentuk kesadaran baru tentang demokrasi, keadilan, dan kesetaraan.⁴²

Aktivisme kaum muda juga berfungsi sebagai wadah pembentukan solidaritas sosial dan media pendidikan politik nonformal yang sangat penting. Paulo Freire (2000) dalam *Pedagogy of the Oppressed* menekankan bahwa pendidikan sejati adalah "*praxis*"—refleksi dan aksi yang ditujukan untuk mengubah dunia. Freire menulis, "*authentic liberation—the process of humanization—is not another deposit to be made in men. Liberation is a praxis: the action and reflection of men and women upon their world in order to transform it.*"⁴³ Aktivisme kaum muda Indonesia merupakan bentuk "*pedagogy of the oppressed*" yang hidup: melalui partisipasi dalam gerakan sosial, kaum muda belajar tentang hak-hak demokratis, mekanisme advokasi, strategi kampanye publik, serta pentingnya kolaborasi dan dialog antarkelompok. Studi Sri Lestari Wahyuningroem (2024) tentang dampak partisipasi dalam gerakan sosial terhadap literasi politik kaum muda menemukan bahwa aktivis yang terlibat dalam gerakan *#TolakOmnibusLaw* menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang proses legislasi (78%),

³⁹ Doni Koesoema, "Gerakan Pendidikan," *Kompas* (10/7/20), <https://www.kompas.id/artikel/gerakan-pendidikan>, diakses pada 23 Oktober 2025.

⁴⁰ Santi Kusumaningrum, dkk., *Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Depok: PUSKAPA, 2023), hlm. 19-22.

⁴¹ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. dan penerj. Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), hlm. 239.

⁴² Dan Jakopovich, "Revolution and The Party in Gramsci's Thought: A Modern Application," *Internasional Viewpoint*, <https://internationalviewpoint.org/spip.php?article1555>, diakses pada 20 Oktober 2025.

⁴³ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, penerj. M. B. Ramos (New York: Continuum International Publishing Group, 2000), hlm. 79.

kesadaran hak konstitusional (84%), dan kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan publik (91%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak terlibat.⁴⁴

Keterlibatan kaum muda dalam aktivisme sosial dan politik bukan sekadar respons spontan terhadap kemunduran demokrasi, melainkan upaya reflektif untuk menafsirkan kembali makna demokrasi itu sendiri. Chantal Mouffe (2000) dalam *The Democratic Paradox* menekankan bahwa demokrasi bukanlah kondisi final, melainkan "*an unfinished project*"—sebuah proses yang terus diperjuangkan dan didefinisikan ulang oleh warga negara.⁴⁵ Mouffe menulis, "*democratic politics does not consist in the search for consensus, but in the recognition and legitimation of conflict.*"⁴⁶ Dalam kerangka ini, kaum muda Indonesia tengah menegosiasikan ulang demokrasi sebagai medan perjuangan etis dan praksis partisipatif, bukan sekadar sistem elektoral lima tahunan. Data yang dimuat oleh Rahma Sugihartati dalam sebuah artikel di majalah Kompas (2023) menunjukkan pergeseran konseptual yang kuat di kalangan generasi muda di mana mayoritas aktivis muda mendefinisikan demokrasi bukan dari keberadaan pemilu, melainkan dari sejauh mana aspirasi rakyat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.⁴⁷

Dalam konteks ini, kaum muda memainkan peran reflektif yang penting. Mereka membawa kesadaran baru tentang nilai-nilai fundamental demokrasi—keadilan, partisipasi, transparansi, dan kesetaraan. John Dewey (1997) dalam *Democracy and Education* menulis bahwa demokrasi sejati memerlukan "*informed and engaged citizenry*" yang tidak hanya memiliki hak suara, tetapi juga kemampuan intelektual dan moral untuk menilai kebijakan publik secara kritis. Bagi Dewey, "*democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.*"⁴⁸ Penelitian dari Khoirul Huda, dkk (2024) mencatat bahwa mayoritas aktivis muda memandang keterlibatan politik bukan lagi sebagai hak individual semata, tetapi sebagai tanggung jawab sosial.⁴⁹ Kesadaran reflektif semacam ini merupakan modal kultural yang vital bagi keberlanjutan demokrasi, karena hanya warga yang reflektif yang mampu membedakan partisipasi bermakna dari sekadar mobilisasi politik transaksional.

Dimensi lain dari peran kaum muda terletak pada fungsi kritis mereka terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang. Michel Foucault (1978) dalam *The History of Sexuality*

⁴⁴ Sri Lestari Wahyuningroem, dkk., *op. cit.*, hlm. 15

⁴⁵ Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox* (London: Verso, 2000), hlm. 7.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁷ Rahma Sugihartati, "Youth, Politics, and the Democracy Gap," *Kompas* (8/8/23), <https://www.kompas.id/artikel/en-anak-muda-politik-dan-kesenjangan-demokrasi>, diakses pada 24 Oktober 2025.

⁴⁸ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: Simon and Schuster, 1997), hlm. 101.

⁴⁹ Khoirul Huda, dkk., "Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2, No.4, 2024, hlm. 765-766.

menegaskan bahwa "*where there is power, there is resistance*."⁵⁰ Bagi Foucault, resistensi bukanlah perlawanan destruktif, melainkan bentuk praksis kritis yang membuka kemungkinan baru bagi kebebasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fithriyatirrizqoh dan Natasyah Zhanaty (2024), tekanan publik yang digerakkan oleh mahasiswa dan aktivis muda berkontribusi pada revisi atau pembatalan 23 kebijakan bermasalah di tingkat nasional dan daerah antara 2019–2023.⁵¹ Fakta ini menegaskan bahwa aktivisme kritis kaum muda berfungsi sebagai mekanisme pengawasan ekstra-institusional—mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh oposisi parlementer, media independen, dan organisasi masyarakat sipil yang melemah.

Namun, peran kaum muda tidak berhenti pada refleksi dan resistensi; mereka juga menjadi agen kreatif yang merancang bentuk-bentuk baru demokrasi partisipatoris. Melalui komunitas belajar, forum warga, dan kolektif seni, mereka menciptakan ruang-ruang deliberatif di luar institusi formal.⁵² Eksperimen ini mencerminkan gagasan Jürgen Habermas (1996) dalam *Between Facts and Norms* tentang "*communicative action*"—yakni tindakan komunikasi yang bebas dari dominasi dan didasarkan pada kesetaraan partisipasi.⁵³ Dalam ruang-ruang publik baru yang dibangun oleh generasi muda, prinsip ini diwujudkan melalui praktik konkret: keputusan diambil secara konsensus, pengelolaan dilakukan transparan, dan perbedaan pendapat dihargai sebagai sumber pembelajaran bersama.

Secara keseluruhan, peran reflektif, kritis, dan kreatif kaum muda dalam transformasi demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk praksis kewargaan kritis (*critical citizenship*). Engin Isin dan Greg Nielsen (2008) dalam *Acts of Citizenship* mendefinisikan "*acts of citizenship*" sebagai tindakan-tindakan yang tidak hanya mengklaim hak yang sudah ada, tetapi juga "*bring into being new forms of being political*."⁵⁴ Isin dan Nielsen menulis, "*acts of citizenship are those moments when actors constitute themselves as those to whom the right to have rights belong*."⁵⁵ Aktivisme kaum muda Indonesia merupakan "*acts of citizenship*" dalam pengertian ini: mereka tidak menunggu diundang ke dalam sistem politik yang ada, tetapi justru menciptakan ruang-ruang politik baru, mendefinisikan isu-isu baru sebagai persoalan publik, dan menuntut pengakuan sebagai subjek politik yang legitim. Praksis kewargaan kritis ini memperluas makna demokrasi dari sekadar mekanisme agregasi preferensi melalui voting,

⁵⁰ Michel Foucault, *The History of Sexuality. Volume One: An Introduction*, penerj. Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 95.

⁵¹ Fithriyatirrizqoh dan Natasyah Aliyah Zhanaty, "Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, 2024, hlm. 498-501.

⁵² Dea Zailani Lestari, dkk., "Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah Peran Pemuda dalam Menjaga Kelangsungan Demokrasi," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 125-126.

⁵³ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, penerj. William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), hlm. 18.

⁵⁴ Engin F. Isin and Greg M. Nielsen, eds., *Acts of Citizenship* (London: Zed Books, 2008), hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

menjadi proses berkelanjutan di mana warga secara aktif membentuk kehidupan bersama mereka. Dengan demikian, kaum muda Indonesia tidak hanya menjadi saksi atas dinamika demokrasi, tetapi juga aktor utama yang menulis ulang narasinya melalui refleksi, resistensi, dan inovasi sosial-politik.

Dari Bonus Demografi ke Bonus Demokrasi: Tantangan dan Prospek Transformasi

Meskipun aktivisme kaum muda telah menunjukkan vitalitas dan potensi transformatif yang signifikan, perjalanan dari bonus demografi menuju bonus demokrasi masih dipenuhi oleh tantangan struktural yang kompleks. Salah satu hambatan internal paling serius adalah fragmentasi gerakan yang membuat energi politik kaum muda sulit terkonsolidasi dalam agenda jangka panjang. Gerakan-gerakan seperti *#ReformasiDikorupsi* atau *#TolakOmnibusLaw* memang berhasil memobilisasi massa dalam jumlah besar, namun seringkali bersifat episodik dan kehilangan momentum setelah isu spesifik mereda. Laporan *Network for Democracy Studies* (2024) mengidentifikasi bahwa 68% gerakan kaum muda di Indonesia mengalami penurunan partisipasi drastis dalam enam bulan setelah puncak mobilisasi, menunjukkan masalah kontinuitas yang serius.⁵⁶ Fragmentasi ini diperparah oleh kompetisi antarkelompok aktivis, perbedaan ideologi, dan tidak adanya platform koordinasi yang *sustainable*. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fenomena komodifikasi isu sosial, di mana aktivisme dijadikan modal simbolik untuk *personal branding* atau *career advancement*, bukan komitmen jangka panjang terhadap perubahan sosial. Ironisnya, media sosial yang menjadi alat mobilisasi juga menciptakan "*activism as performance*"—aktivisme sebagai tontonan—yang lebih mementingkan visibilitas daripada substansi.⁵⁷

Tantangan eksternal yang dihadapi kaum muda tidak kalah kompleks. Negara dan elite politik telah mengembangkan strategi canggih untuk menetralkan potensi transformatif aktivisme muda, mulai dari kooptasi hingga represi halus. Studi dari Muhammad Kausar (2023) menemukan bahwa mayoritas aktivis muda yang menonjol dalam gerakan 2019-2022 kemudian "diserap" ke dalam struktur partai politik atau lembaga pemerintah, seringkali dengan kompensasi ekonomi yang menarik namun mengurangi independensi kritis mereka.⁵⁸ Antonio Gramsci pernah memperingatkan bahwa hegemoni kekuasaan bekerja tidak hanya melalui koersi, tetapi terutama melalui konsensus—dengan menyerap elemen-elemen oposisi ke dalam sistem yang dikritik.⁵⁹ Kooptasi ini efektif karena menawarkan solusi pragmatis bagi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi banyak aktivis muda. Di sisi lain, proliferasi disinformasi

⁵⁶ Sri Lestari Wahyuningroem, dkk, *op. cit.*, hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Muhammad Kausar, "Anak Muda, Pemilu dan Politik Indonesia", dalam *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, No. 7, Juli 2023, hlm. 5316.

⁵⁹ Antonio Gramsci, *op. cit.*, hlm. 145.

digital telah menciptakan apa yang disebut Shoshana Zuboff (2019) sebagai "*surveillance capitalism*," di mana algoritma media sosial justru memperkuat *echo chambers* dan polarisasi, membuat dialog lintas kelompok semakin sulit.⁶⁰ Kebijakan publik pun belum berpihak pada pemberdayaan substantif kaum muda: anggaran untuk pendidikan politik dan *civic engagement* tetap minim, sementara regulasi seperti UU ITE terus digunakan untuk mengkriminalisasi kritik.

Menghadapi kompleksitas tantangan ini, transformasi menuju bonus demokrasi memerlukan strategi holistik yang melampaui aktivisme reaktif. Hannah Arendt membedakan antara "*labor*" (kerja untuk bertahan hidup), "*work*" (produksi artifak), dan "*action*" (praksis politik yang menciptakan makna bersama). Aktivisme kaum muda perlu bertransformasi dari "*labor*" politik yang melelahkan dan repetitif menjadi "*action*" dalam pengertian Arendtian—tindakan politik yang deliberatif, reflektif, dan menciptakan ruang kebebasan baru.⁶¹ Ini menuntut investasi serius dalam pendidikan politik reflektif yang tidak hanya mengajarkan mekanisme demokrasi, tetapi juga mengembangkan kapasitas untuk analisis struktural dan pemikiran strategis jangka panjang. Program *Citizens' Assemblies* yang dikembangkan di Irlandia dan Perancis, di mana warga biasa diberi ruang dan sumber daya untuk mempelajari isu kompleks dan merumuskan rekomendasi kebijakan, bisa menjadi model yang diadaptasi. Literasi digital kritis juga menjadi urgent: bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan membedakan informasi berkualitas dari disinformasi, memahami logika algoritma, dan menggunakan platform digital secara strategis tanpa terperangkap dalam *dopamine-driven activism*.⁶²

Yang tak kalah penting adalah partisipasi bermakna kaum muda dalam proses kebijakan. Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa perubahan sosial memerlukan transformasi pada level "*habitus*"—disposisi dan praktik sosial yang terinternalisasi.⁶³ Partisipasi kaum muda dalam forum-forum kebijakan, konsultasi publik, dan proses perencanaan pembangunan bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi mekanisme untuk mengubah *habitus* politik dari yang transaksional menjadi deliberatif, dari yang elitis menjadi partisipatoris. Studi Khoirul Huda, dkk. (2024) menunjukkan bahwa daerah-daerah di Indonesia yang melibatkan kaum muda secara substantif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memiliki tingkat kepercayaan

⁶⁰ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019), hlm. 93-97

⁶¹ Hannah Arendt, *op. cit.*, hlm. 7.

⁶² Dinda Aurellia dan Katimin, "Arah Baru Politik di Era Digital (Perspektif Generasi Milenial di Media Sosial)", dalam *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 4, No. 2, Juni 2025, hlm. 234-235.

⁶³ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, penerj. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 72-78.

publik terhadap pemerintah lokal lebih tinggi dibandingkan daerah tanpa mekanisme partisipasi tersebut.⁶⁴

Prospek transformasi dari bonus demografi ke bonus demokrasi pada akhirnya bergantung pada kemampuan kaum muda untuk menjadikan aktivisme sebagai praksis etis yang berkelanjutan, bukan sekadar respons emosional terhadap krisis sesaat. Paulo Freire mengingatkan bahwa "*washing one's hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral.*"⁶⁵ Netralitas atau *withdrawal* dari politik bukan pilihan etis di tengah krisis demokrasi. Namun, keterlibatan politik pun harus melampaui siklus mobilisasi-demobilisasi yang melelahkan, menuju pembangunan institusi-institusi alternatif yang *sustainable*—koperasi, komunitas belajar, media independen, *watchdog citizens*—yang menjadi infrastruktur demokrasi *grassroots*. Jika generasi muda mampu memadukan energi aktivisme dengan refleksi kritis, solidaritas kolektif dengan otonomi individual, dan idealisme dengan strategi pragmatis, maka bonus demografi Indonesia bisa menjadi momentum historis bagi pembaruan demokrasi substantif yang melampaui capaian Reformasi 1998

Penutup

Bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia bukan sekadar fenomena statistik, melainkan penanda historis yang membuka peluang bagi transformasi demokrasi. Namun, peluang tersebut hanya akan bermakna apabila keberlimpahan penduduk muda diiringi dengan kesadaran kritis, partisipasi reflektif, dan kapasitas kolektif untuk mengubah struktur sosial-politik yang timpang. Dalam konteks inilah, aktivisme kaum muda menjadi medium praksis kewargaan yang menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat diwariskan begitu saja, tetapi harus terus diperjuangkan. Energi politik generasi muda yang lahir dari kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural menunjukkan bahwa bonus demografi dapat menjadi fondasi bagi bonus demokrasi—yakni situasi ketika kualitas demokrasi meningkat seiring meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi warga mudanya.

Meski demikian, transformasi menuju bonus demokrasi bukan proses yang linear. Ia menuntut ketahanan reflektif di tengah fragmentasi gerakan, kooptasi kekuasaan, serta penetrasi logika kapitalisme digital yang kerap mengubah aktivisme menjadi sekadar performa simbolik. Tantangan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas intelektual dan moral generasi muda agar tetap mampu mempertahankan independensi kritis di tengah tekanan pragmatisme politik dan ekonomi. Dalam hal ini, pendidikan politik progresif, ruang publik deliberatif, dan kebijakan

⁶⁴ Khoirul Huda, dkk, *op. cit.*, hlm. 767.

⁶⁵ Paulo Freire, *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*, penerj. Donaldo Machado (New York: Bergin & Garvey, 1985), hlm. 122.

negara yang berpihak pada pemberdayaan sipil menjadi faktor kunci yang menentukan arah transformasi tersebut. Tanpa dukungan institusional dan ekosistem demokratis yang sehat, energi kaum muda berisiko menguap menjadi euforia sesaat tanpa menghasilkan perubahan struktural yang nyata.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh sejauh mana kaum muda mampu mengubah kelebihan demografis menjadi kelebihan moral dan intelektual bagi bangsa. Bonus demografi hanya akan menjadi bonus demokrasi jika generasi muda tidak berhenti pada resistensi, tetapi melangkah menuju konstruksi praksis politik baru yang lebih etis, partisipatoris, dan berkeadilan. Dalam horizon historis yang lebih luas, peran reflektif, kritis, dan kreatif kaum muda hari ini akan menentukan arah evolusi demokrasi Indonesia di masa depan—apakah tetap menjadi demokrasi prosedural yang stagnan, atau tumbuh menjadi demokrasi substantif yang berakar pada kesadaran warga dan solidaritas sosial. Dengan demikian, transformasi dari bonus demografi ke bonus demokrasi bukan sekadar agenda politis, melainkan proyek peradaban yang menuntut keterlibatan generasi muda sebagai subjek sejarah yang membentuk masa depan bangsanya.

Daftar Rujukan

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. University of Chicago Press, 1998.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press, 2019.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet*. Pusat APJII, 2025.
- Aurellia, Dinda, dan Katimin. "Arah Baru Politik di Era Digital (Perspektif Generasi Milenial di Media Sosial)." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, vol. 4, no. 2, Juni 2025.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Penerj. Richard Nice. Cambridge University Press, 1977.
- Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press, 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2014.
- Dewangga, Denint Akbar Reggi, dkk. "Peran Pemuda dalam Mengawal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital (Studi Kasus: Masa Pemilihan Presiden 2024)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 7, 2024.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. Simon and Schuster, 1997.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan*. Badan Pusat Statistik, 2022.

- Febiola, Annisa. "Studi PISA 2022: Indonesia Naik Peringkat tapi Skor Turun." *Tempo.com*, 5 Desember 2023, www.tempo.co/politik/studi-pisa-2022-indonesia-naik-peringkat-tapi-skor-turun-112219.
- Fithriyatirrizqoh, dan Natasyah Aliyah Zhanaty. "Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 24, 2024.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality. Volume One: An Introduction*. Penerj. Robert Hurley. Pantheon Books, 1978.
- Freedom House. "Indonesia." *Freedom in The World 2025*, freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Penerj. M. B. Ramos. Continuum International Publishing Group, 2000.
- , *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*. Translated by Donaldo Machado, Bergin & Garvey, 1985.
- Girsang, Vedro Imanuel. "EIU Research: Indonesia's Democracy Rated as 'Flawed' After 2024 Elections." *Tempo English*, en.tempo.co/read/1982814/eiu-research-indonesias-democracy-rated-as-flawed-after-2024-elections.
- , "Indeks Demokrasi Indonesia 2024 Turun Tiga Peringkat." *Tempo*, 5 Maret 2025, www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. Ed. dan penerj. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. International Publishers, 1971.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Penerj. William Rehg. MIT Press, 1996.
- Huda, Khoirul, dkk. "Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, vol. 2, no. 4, 2024.
- Isin, Engin F., and Greg M. Nielsen, editors. *Acts of Citizenship*. Zed Books, 2008.
- Jakopovich, Dan. "Revolution and The Party in Gramsci's Thought: A Modern Application." *Internasional Viewpoint*, internationalviewpoint.org/spip.php?article1555.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia?" *Populasi*, vol. 23, no. 1, 2015.
- Jatnika, Yanuar. "Upaya Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi." *Puslapdik Kemendikdasmen*, puslapdik.kemendikdasmen.go.id/upaya-meningkatkan-apk-pendidikan-tinggi/.
- Kamelia, Robiatul. "Bonus Demografi: Pengertian, Dampak Negatif, dan Positifnya." *Tirto.id*, 15 Mei 2025, tirto.id/dampak-negatif-bonus-demografi-hbLA.
- Kausar, Muhammad. "Anak Muda, Pemilu dan Politik Indonesia." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, vol. 6, no. 7, Juli 2023.
- Keladu, Yosef. "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 14, no. 2, 2023.

- Koesoema, Doni. "Gerakan Pendidikan." *Kompas*, 10 Juli 2020, www.kompas.id/artikel/gerakan-pendidikan.
- Kusumaningrum, Santi, dkk. *Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. PUSKAPA, 2023.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia, 2022.
- Lembaga Survei Indikator. *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik: Temuan Survei Nasional*. LSI, 2024.
- Lestari, Dea Zailani, dkk. "Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah Peran Pemuda dalam Menjaga Kelangsungan Demokrasi." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, vol. 1, no. 3, Juli 2024.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. Verso, 2000.
- Pradipta, Krisna. "Gerakan Indonesia Gelap." *Tempo*, 20 Februari 2025, www.tempo.co/infografik/infografik/gerakan-indonesia-gelap-1209865.
- Qomariyah, Nurul, dkk. "Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi di Tahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2, no. 1, Mei 2023.
- Rahmat Affandi, dan Katimin. "Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia)." *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, vol. 4, no. 2, 2025.
- Safitri, Riska Dian, dan Muh Rezza. "Membedah Tren Tingginya Angka Pengangguran Terbuka Pada Gen Z Di Indonesia." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, vol. 2, no. 1, Januari 2025.
- Sucahyo, Nurhadi. "Partai Anak Muda untuk Reduksi Polarisasi dan Lawan Oligarki." *VOA Indonesia*, www.voaindonesia.com/a/partai-anak-muda-untuk-reduksi-polarisasi-dan-lawan-oligarki/6542673.html.
- Sugihartati, Rahma. "Youth, Politics, and the Democracy Gap." *Kompas*, 8 Agustus 2023, www.kompas.id/artikel/en-anak-muda-politik-dan-kesenjangan-demokrasi.
- Susanti, Bivitri. "Aktivisme dan Ketidakadilan." *Kompas*, 16 Oktober 2025, www.kompas.id/artikel/aktivisme-dan-ketidakadilan.
- Tilly, Charles. *Social Movements: 1768–2004*. Paradigm Publishers, 2004.
- Wahyudi, Muchamad Zaid. "Demonstrasi dan Anarki Massa, Buah Bonus Demografi yang Dilupakan." *Kompas*, 3 September 2025, www.kompas.id/artikel/demonstrasi-dan-anarki-massa-buah-bonus-demografi-yang-dilupakan.
- Wahyuningroem, Sri Lestari, dkk. "Youth Political Participation and Digital Movement In Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw." *F1000Research*, vol. 12 543, April 2024.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs, 2019.